

REHABILITASI TRAUMA KORBAN TINDAK PIDANA

Anjelia Debra^{1*}, Nickolas Yohannes², Ricky Banke³

^{1,2,3}Universitas Pelita Harapan Medan
03051210044@student.uph.edu*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 6 Desember 2023

Page: 586-591

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1048>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1048>

Article History:

Received: 03-12-2023

Revised: 08-12-2023

Accepted: 08-12-2023

Abstract : Rehabilitation of trauma victims is a critical process to restore the psychological well-being of individuals exposed to violence or crime. This approach involves psychological support, therapy, and holistic interventions to address the psychological impact caused by traumatic experiences. The main focus is on rebuilding a sense of safety, promoting mental recovery, and developing healthy coping strategies. A team of professionals, including psychologists and social workers, collaborates to create a supportive environment where victims feel heard and understood. Trauma rehabilitation not only addresses symptoms but also strengthens individuals' resilience to future stress. Through this approach, it is hoped that victims of criminal acts can regain balance in their lives and embark on a journey towards sustainable healing.

Keywords : Rehabilitation Trauma, Victims Criminal Acts, Psychological Well-being

Abstrak : Rehabilitasi trauma korban tindak pidana merupakan proses kritis untuk memulihkan kesejahteraan psikologis individu yang terpapar kekerasan atau kejahatan. Pendekatan ini melibatkan dukungan psikologis, terapi, dan intervensi holistik guna mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan oleh pengalaman traumatis. Fokus utama adalah membangun kembali rasa aman, mempromosikan pemulihan mental, dan mengembangkan strategi koping yang sehat. Tim profesional, termasuk psikolog dan pekerja sosial, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana korban dapat merasa didengar dan dipahami. Rehabilitasi trauma bukan hanya memperbaiki gejala, tetapi juga memperkuat ketahanan individu terhadap stres masa depan. Melalui pendekatan ini, diharapkan korban tindak pidana dapat mengembalikan keseimbangan hidupnya dan memulai perjalanan menuju kesembuhan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Rehabilitasi Trauma, Korban Tindak Pidana, Kesejahteraan Psikologis

PENDAHULUAN

Rehabilitasi trauma korban tindak pidana mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh individu yang mengalami kekerasan atau kejahatan. Pengalaman traumatik dapat memiliki dampak yang mendalam pada kesejahteraan psikologis, sosial, dan emosional korban, memerlukan pendekatan rehabilitasi yang holistik. Penyelidikan lebih lanjut ke dalam latar belakang ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi dan kompleksitas rehabilitasi trauma korban tindak pidana.¹

Secara psikologis, korban tindak pidana sering menghadapi tantangan serius dalam memproses dan mengatasi dampak psikologis traumatis. Penderitaan emosional, kecemasan, dan gangguan tidur dapat menghambat kemampuan individu untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Terapi psikologis dan dukungan emosional menjadi elemen kritis dalam membantu korban memahami dan mengelola reaksi psikologis mereka terhadap pengalaman traumatis. Dengan mendalamnya pemahaman tentang dinamika psikologis ini, program rehabilitasi dapat dirancang untuk secara khusus menanggapi kebutuhan psikologis unik dari setiap korban.

Dari segi sosial, stigma sering kali menjadi kendala signifikan bagi korban tindak pidana untuk mencari bantuan dan berpartisipasi dalam proses rehabilitasi. Masyarakat kadang-kadang cenderung menyalahkan korban, menciptakan hambatan bagi mereka untuk membuka diri terhadap dukungan dan integrasi sosial. Oleh karena itu, latar belakang sosial korban menjadi pertimbangan penting dalam merancang program rehabilitasi yang melibatkan pendekatan masyarakat. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak trauma dan mengurangi stigmatisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk proses rehabilitasi.

Aspek lain dari latar belakang masalah ini adalah ketidaksetaraan akses terhadap layanan rehabilitasi. Faktor ekonomi, geografis, dan budaya dapat menjadi penghalang bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan akses ke perawatan yang tepat waktu dan efektif. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam pemulihan, dan bagaimana upaya dapat dilakukan untuk memastikan bahwa semua korban, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya rehabilitasi yang diperlukan.

Perubahan dinamika kejahatan dan perkembangan teknologi juga dapat memberikan kontribusi terhadap latar belakang masalah ini. Tindakan kriminal yang melibatkan cyber, misalnya, dapat meningkatkan tingkat ketidaknyamanan psikologis dan meninggalkan dampak jangka panjang yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks rehabilitasi. Oleh karena itu, penyelidikan yang lebih mendalam mengenai adaptasi program rehabilitasi terhadap perubahan tren kejahatan dan teknologi menjadi penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas proses rehabilitasi.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi terhadap rehabilitasi trauma korban tindak pidana. Ini melibatkan kolaborasi antara sektor kesehatan mental, lembaga hukum, masyarakat, dan sektor terkait lainnya. Merumuskan strategi yang mengintegrasikan berbagai aspek rehabilitasi, mulai dari dukungan psikologis hingga peningkatan kesadaran masyarakat, dapat menjadi langkah efektif dalam mengatasi kompleksitas masalah ini.²

Dengan demikian, latar belakang masalah ini membuka jendela pandang yang luas terhadap tantangan dan peluang dalam memperbaiki sistem rehabilitasi trauma korban tindak pidana. Pemahaman mendalam tentang dampak psikologis, sosial, dan ekonomi, serta ketidaksetaraan akses, memberikan landasan untuk merancang solusi yang komprehensif dan inklusif. Sebagai hasilnya, penelitian dan implementasi kebijakan yang terfokus pada pemulihan holistik dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup korban dan membentuk masyarakat yang lebih mendukung. Berangkat dari latar belakang tersebut menjadi sebuah permasalahan yaitu pertama, bagaimana dampak psikologis korban tindak pidana

¹Sudarsono. (2020). *"Psikologi Trauma: Dampak dan Pemulihan."* Jakarta : Pustaka Raya. hlm, 89

²Widyastuti. (2018). *"Stigma Sosial terhadap Korban Kekerasan: Sebuah Tinjauan Budaya."* Yogyakarta : Penerbit Gama Media. hlm, 66

mempengaruhi efektivitas rehabilitasi trauma, dan bagaimana program rehabilitasi dapat dirancang untuk secara khusus menanggapi kebutuhan psikologis individu?; kedua, apa hambatan utama yang dihadapi korban tindak pidana dalam mengakses layanan rehabilitasi, baik dari segi sosial, ekonomi, atau budaya, dan bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan untuk mengatasi ketidaksetaraan akses ini guna memastikan rehabilitasi yang adil dan merata?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki dampak psikologis korban tindak pidana dan hambatan dalam akses rehabilitasi.³ Metode wawancara mendalam dengan korban dan ahli psikolog akan digunakan untuk memahami pengalaman individu dan memetakan kebutuhan rehabilitasi. Selain itu, analisis konten akan dilakukan terhadap literatur ilmiah, kebijakan, dan laporan resmi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang isu ini. Survei dengan pertanyaan terstruktur akan disebarluaskan kepada kelompok yang representatif secara demografis untuk mengidentifikasi faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi akses rehabilitasi. Integrasi temuan kualitatif dan kuantitatif akan memberikan pandangan komprehensif terhadap tantangan rehabilitasi trauma korban tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Psikologis Korban Tindak Pidana Mempengaruhi Efektivitas Rehabilitasi Trauma, Dan Bagaimana Program Rehabilitasi Dapat Dirancang Untuk Secara Khusus Menanggapi Kebutuhan Psikologis Individu

Dampak psikologis korban tindak pidana merupakan inti dari tantangan rehabilitasi trauma yang kompleks. Individu yang mengalami kekerasan atau kejahatan seringkali menghadapi dampak mendalam pada kesejahteraan mental mereka. Stres pasca-trauma, gangguan tidur, dan kecemasan sering muncul, menciptakan lanskap psikologis yang rumit. Dalam upaya memahami dan merespon efektif terhadap dampak ini, program rehabilitasi harus dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan psikologis individu.

Pertama, perlu diperhatikan bahwa dampak psikologis dapat bervariasi secara signifikan antara individu. Beberapa korban mungkin mengalami stres pasca-trauma yang mendalam, sementara yang lain mungkin mengalami depresi atau gangguan kecemasan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi harus dapat menyesuaikan diri dengan keunikan setiap kasus. Ini mungkin melibatkan penerapan metode terapi yang beragam, termasuk terapi kognitif perilaku, terapi bicara, atau terapi seni, sesuai dengan kebutuhan spesifik korban.⁴

Program rehabilitasi juga harus memahami bahwa dukungan psikologis tidak bersifat satu kali, melainkan sebuah proses berkelanjutan. Memberikan layanan konseling jangka panjang dan membangun hubungan terapeutik yang kuat antara korban dan para profesional kesehatan mental menjadi penting. Ini membantu korban dalam mengatasi traumanya seiring waktu dan membangun kembali kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain.

Program rehabilitasi harus mengakui peran penting keluarga dan jaringan sosial dalam mendukung proses pemulihan. Melibatkan keluarga dalam sesi terapi atau menyediakan dukungan kelompok dapat memberikan lingkungan sosial yang positif. Mendorong keterlibatan sosial ini dapat membantu korban merasa didukung, mengurangi rasa Isolasi, dan mempromosikan pemulihan yang lebih baik.

Penting juga untuk menyesuaikan pendekatan rehabilitasi sesuai dengan jenis kejahatan yang dialami korban. Misalnya, korban kekerasan seksual mungkin membutuhkan strategi rehabilitasi yang berbeda dibandingkan dengan korban kekerasan fisik atau kejahatan cyber. Kepekaan terhadap konteks kejahatan dan karakteristik individu memungkinkan penyedia layanan untuk menentukan metode terbaik yang sesuai.

³Rahmawati. (2020). *"Pendidikan Masyarakat: Kunci Menuju Lingkungan yang Dukung Rehabilitasi Korban."* Yogyakarta : Penerbit Cendekia. hlm, 99

⁴Santoso. (2019). *"Tantangan Ekonomi dalam Akses Rehabilitasi Korban Tindak Pidana."* Surabaya : Kencana Press. hlm, 79

Pendekatan holistik terhadap rehabilitasi psikologis juga melibatkan integrasi layanan dukungan ke dalam sistem yang lebih besar, termasuk layanan kesehatan mental dan layanan masyarakat. Kolaborasi antara profesional kesehatan mental, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pendekatan rehabilitasi yang menyeluruh dan efektif.

Pemberdayaan korban untuk mengambil peran aktif dalam proses rehabilitasi mereka juga harus menjadi fokus. Pemberian pengetahuan dan keterampilan coping kepada korban membantu mereka mengelola dampak psikologis dengan lebih efektif. Pendidikan tentang reaksi psikologis yang mungkin terjadi dan strategi untuk mengatasi stres dapat memberikan kontrol pada korban atas pemulihan mereka sendiri.

Di tengah pendekatan ini, sensitivitas terhadap aspek budaya dan keberagaman menjadi esensial. Program rehabilitasi harus dapat mengakomodasi perbedaan budaya dan nilai-nilai individu, menghindari generalisasi, dan menghormati keunikan pengalaman korban berdasarkan latar belakang mereka.⁵

Sehingga, efektivitas rehabilitasi trauma korban tindak pidana sangat terkait dengan pemahaman mendalam terhadap dampak psikologis yang dialami individu. Program rehabilitasi yang berhasil harus mengadopsi pendekatan yang khusus dan holistik, mengakui keragaman respon psikologis, dan melibatkan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, membangun fondasi rehabilitasi yang kuat memerlukan kombinasi upaya yang terkoordinasi, pemberdayaan korban, dan pengakuan atas kompleksitas kebutuhan psikologis yang melibatkan mereka dalam perjalanan pemulihan mereka.

B. Hambatan Utama Yang Dihadapi Korban Tindak Pidana Dalam Mengakses Layanan Rehabilitasi, Baik Dari Segi Sosial, Ekonomi, Atau Budaya, Dan Bagaimana Kebijakan Dapat Diimplementasikan Untuk Mengatasi Ketidaksetaraan Akses Ini Guna Memastikan Rehabilitasi Yang Adil Dan Merata

Korban tindak pidana sering menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan dalam mengakses layanan rehabilitasi, dan tantangan ini melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap hambatan utama ini menjadi krusial untuk merancang kebijakan yang mampu mengatasi ketidaksetaraan akses dan memastikan rehabilitasi yang adil serta merata bagi semua korban.

Salah satu hambatan utama adalah stigmatisasi sosial terhadap korban tindak pidana. Masyarakat sering kali memiliki persepsi negatif terhadap korban, menyalahkan mereka atau merasa bahwa mereka berkontribusi pada pengalaman traumatis yang mereka alami. Akibatnya, korban mungkin enggan mencari bantuan atau mengakui kebutuhan rehabilitasi mereka karena takut dicap atau dijauhi oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kebijakan perlu memprioritaskan upaya untuk mengurangi stigmatisasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengalaman yang dialami korban.⁶

Aspek ekonomi juga menjadi hambatan serius dalam akses rehabilitasi. Banyak korban tindak pidana menghadapi beban finansial yang signifikan akibat biaya pengobatan, konseling, dan layanan rehabilitasi. Terlebih lagi, beberapa korban mungkin kehilangan pekerjaan atau pendapatan sebagai dampak dari tindak pidana, yang semakin mempersulit kemampuan mereka untuk membayar layanan rehabilitasi yang diperlukan. Dalam mengatasi hambatan ini, kebijakan dapat mencakup penyediaan subsidi atau layanan rehabilitasi yang terjangkau, serta dukungan finansial untuk membantu korban mengatasi beban ekonomi yang mungkin mereka hadapi.

Faktor geografis juga dapat menjadi hambatan akses. Korban yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan mental dan rehabilitasi mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Kebijakan yang mendukung pengembangan layanan kesehatan mental di daerah pedesaan atau menyediakan

⁵Nurlaila. (2021). *"Geografi Pelayanan Kesehatan Mental: Perspektif Korban di Daerah Terpencil."* Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm, 31

⁶Suryani. (2017). *"Budaya dan Gender dalam Rehabilitasi Korban Tindak Pidana."* Semarang : Penerbit Universitas Semarang. hlm, 12

alternatif seperti layanan jarak jauh dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan geografis dan memastikan bahwa korban di semua wilayah dapat mengakses rehabilitasi.

Aspek budaya juga perlu diperhitungkan, karena norma budaya dan perbedaan bahasa dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi dan memahami kebutuhan korban. Program rehabilitasi yang dapat menyesuaikan diri dengan beragam latar belakang budaya, menyediakan interpretasi bahasa, atau melibatkan tenaga kesehatan mental yang memahami keragaman budaya dapat menjadi langkah kunci untuk memastikan bahwa layanan rehabilitasi benar-benar dapat diakses oleh semua individu, tanpa memandang latar belakang budaya mereka.

Terkait dengan hambatan budaya, peran gender juga harus diperhitungkan. Korban tindak pidana mungkin menghadapi hambatan tambahan berdasarkan identitas gender mereka. Misalnya, korban perempuan kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga mungkin mengalami ketidaknyamanan atau kesulitan dalam mengakses layanan rehabilitasi yang mencerminkan kebutuhan khusus mereka. Kebijakan harus memperhitungkan pandangan gender dan memastikan bahwa layanan rehabilitasi tidak hanya mencakup, tetapi juga mengutamakan kebutuhan korban berdasarkan identitas gender mereka.⁷

Penting juga untuk melibatkan lembaga hukum dalam menciptakan kebijakan yang mendukung akses rehabilitasi. Dukungan dan kerja sama yang erat antara lembaga hukum dan penyedia layanan rehabilitasi dapat menciptakan jalur yang lebih efektif untuk memandu korban menuju rehabilitasi. Sistem peradilan pidana harus memahami pentingnya mengarahkan korban ke layanan rehabilitasi yang sesuai sebagai bagian integral dari proses pemulihan pascakejahatan.

Dalam rangka memastikan rehabilitasi yang adil dan merata, kebijakan juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak korban dan layanan rehabilitasi yang tersedia. Pendidikan masyarakat dapat membantu mengubah sikap dan perilaku, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi korban untuk mencari bantuan dan mengakses layanan rehabilitasi.

Sehingga, mengatasi hambatan akses korban tindak pidana terhadap layanan rehabilitasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Kebijakan harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi stigmatisasi sosial, hambatan ekonomi, faktor geografis, perbedaan budaya, dan aspek gender. Melibatkan korban, masyarakat, lembaga hukum, dan penyedia layanan dalam pengembangan kebijakan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa rehabilitasi menjadi hak yang dapat diakses oleh semua korban tindak pidana, mendukung proses pemulihan mereka secara adil dan merata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam menghadapi dampak psikologis korban tindak pidana, diperlukan program rehabilitasi yang dapat menyesuaikan diri dengan keunikan setiap individu. Hambatan akses, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya, menjadi tantangan serius yang memerlukan kebijakan inklusif. Stigmatisasi sosial, beban ekonomi, faktor geografis, dan aspek budaya serta gender menjadi hambatan utama. Untuk memastikan rehabilitasi yang adil dan merata, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat, lembaga hukum, dan penyedia layanan. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, dan kebijakan harus mengakomodasi perbedaan budaya serta mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Integrasi hak korban dalam sistem peradilan pidana dan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan korban menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Nurlaila. (2021). *"Geografi Pelayanan Kesehatan Mental: Perspektif Korban di Daerah Terpencil."* Bandung : Remaja Rosdakarya.

⁷Pranata. (2019). *"Dinamika Perubahan Kebijakan Hukum terhadap Hak Korban di Sistem Peradilan Pidana."* Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm, 13

- Pranata. (2019). *"Dinamika Perubahan Kebijakan Hukum terhadap Hak Korban di Sistem Peradilan Pidana."* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahmawati. (2020). *"Metode Penelitian Hukum."* Yogyakarta : Penerbit Cendekia.
- Santoso. (2019). *"Tantangan Ekonomi dalam Akses Rehabilitasi Korban Tindak Pidana."* Surabaya : Kencana Press.
- Sudarsono. (2020). *"Psikologi Trauma: Dampak dan Pemulihan."* Jakarta : Pustaka Raya.
- Suryani. (2017). *"Budaya dan Gender dalam Rehabilitasi Korban Tindak Pidana."* Semarang : Penerbit Universitas Semarang.
- Widyastuti. (2018). *"Stigma Sosial terhadap Korban Kekerasan: Sebuah Tinjauan Budaya."* Yogyakarta : Penerbit Gama Media.